Berkomitmen Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pj. Bupati Pasuruan Serahkan LKPD Unaudited TA 2023

Selasa, 5 Maret 2024

Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Selasa (5/3/2024). Penyerahan dilakukan sesuai amanat Undang-undang, yaitu paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPD Unaudited Kabupaten Pasuruan terdiri dari 7 laporan, termasuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan Laporan Arus Kas.

Acara penyerahan secara seremonial diawali dengan sambutan dari Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan, Ahmadi Noor Supit. Pj. Gubernur Jawa Timur menyampaikan dukungannya kepada Kepala Daerah untuk mewujudkan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan terpercaya, menekankan pentingnya informasi yang terkandung dalam LKPD untuk perencanaan selanjutnya.

Pj. Gubernur Jawa Timur juga menekankan pentingnya good governance dan berharap seluruh Kepala Daerah di Jawa Timur dapat mempertahankan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih tahun lalu. Ia juga mendorong upaya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa mendatang.

Penyerahan LKPD Unaudited dilakukan secara serentak oleh seluruh Pemerintah Daerah se-Jawa Timur, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. LKPD merupakan wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan terdiri dari berbagai laporan keuangan yang memberikan informasi detail mengenai kondisi keuangan daerah.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.